

**IPTEKS PENGENDALIAN INTERN TERHADAP ASET TETAP DAN
PERSEDIAAN DI KANTOR OTORITAS JASA KEUANGAN / KOJK PROVINSI
SULAWESI UTARA, GORONTALO DAN MALUKU UTARA**

Siti Sakina Nani¹, Sifrid. S. Pangemanan²

^{1,2}Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi, Jl. Kampus Unsrat, Manado,
95115, Indonesia

E-mail : sitisakinanani@gmail.com

ABSTRACT

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) is independent institution that performs duties and function of supervision in financial sector industry. This institution also does not escape from the use of fixed assets and inventories. The procurement of fixed assets depends on a certain nominal with recognition based on a positive list in accordance with the internal provisions applicable in the OJK. Internal control in the management of fixed assets and inventory is needed, so as to encourage the productivity of the operational performance of the OJK. Based on the research that has been done, internal control will run effectively and efficiently if it refers to the points in internal control, namely objectives, commitment, capability and supervision and learning. The results of this study are suggested to use the FIFO method in terms of structuring inventory so that the possibility of non-use / damaged goods becomes smaller

Keywords : Internal Control, Fixed Asset, Inventory

1. PENDAHULUAN

Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya setiap organisasi baik itu organisasi yang bersifat profit maupun tidak bersifat profit, tidak lepas dari penggunaan aset baik itu aset lancar seperti persediaan maupun aset tetap seperti peralatan, mesin dan bangunan. Namun pengelolaan aset di setiap organisasi dapat berbeda beda baik dipengaruhi oleh proses bisnis, kegiatan rutin yang dilakukan maupun industri dimana organisasi tersebut berkecimpung. Di Kantor OJK Provinsi Sulawesi Utara, Maluku Utara dan Gorontalo manajemen aset tetap mengacu pada Keputusan Deputy Komisioner Manajemen Strategis II B Nomor KEP-04/MS.4/2015 tentang daftar aset tetap dan aset tak berwujud Otoritas Jasa Keuangan dan manajemen aset lancar dalam hal ini persediaan terdapat pada SEDK Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEDK.02/2017 tentang amandemen ketiga atas SEDK OJK Nomor 22/SEDK.02/2014 tentang pedoman akuntansi Otoritas Jasa Keuangan.

Aset tetap merupakan aset berwujud atau yang memiliki fisik yang siap pakai atau dengan dilakukan pembangunan terlebih dahulu, yang nantinya akan dipakai dalam aktivitas Otoritas Jasa Keuangan, bukan untuk dijual dan memiliki satu tahun atau lebih masa manfaat. Sedangkan persediaan adalah aset lancar yang diperoleh antara lain dalam bentuk alat tulis kantor dan perlengkapan komputer yang disimpan dalam ruang penyimpanan satuan kerja yang melakukan pengadaan persediaan dan belum digunakan untuk kegiatan Otoritas Jasa Keuangan. Dalam hal penyampaian laporan rekonsiliasi aset dan atau persediaan kepada Otoritas Jasa Keuangan Pusat, departemen logistik Kantor OJK Provinsi Sulawesi Utara, Maluku Utara dan Gorontalo wajib mencatat dan melaporkan transaksi pembelian yang menggunakan akun anggaran aset pada tanggal 5 bulan berikutnya. Oleh karena itu pengendalian internal yang baik perlu diterapkan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Criteria of Control (COCO). Criteria of Control (COCO) merupakan model pengendalian internal yang disusun The Canadian Institute of Chartered Accountants atau yang dikenal dengan CPA Canada memiliki komponen yang terdiri atas : (1) tujuan; (2) komitmen; (3) kemampuan; dan (4) pengawasan dan pembelajaran.

Laporan Keuangan OJK. Tujuan utama pelaporan keuangan OJK sebagaimana diatur dalam PDK No. 01/13/PDK/XII/2012 mengenai accounting standar and policy Otoritas Jasa Keuangan, adalah dalam rangka transparansi dan akuntabilitas kepada publik. Penyusunan laporan keuangan di OJK dilakukan persemesteran dan tahunan dengan periode laporan keuangan tanggal 1 januari hingga 31 desember. Anggaran OJK bersumber pada pengutan yang berasal dari kelompok maupun pihak yang melakukan aktivitas atau kegiatan di industry lembaga jasa keuangan. Unsur laporan keuangan OJK terdiri dari : (1) statemen of financial position; (2) activity report; (3) cash flow; dan (4) CALK. Pengakuan OJK berhubungan dengan transaksi dan kejadian ekonomi yang disajikan dalam laporan aktivitas dan laporan posisi keuangan diakui secara akrual, kecuali yang disajikan dalam laporan arus kas. Dalam hal pencatatan transaksi serta pelaporan OJK menggunakan kurs Rupiah.

Aset Tetap. Menurut Peraturan Dewa Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/PDK 0.2/2013, aset tetap dapat diartikan sebagai aset berwujud atau yang memiliki fisik yang siap dipakai atau dengan dilakukan pembangunan terlebih dahulu, yang nantinya dipakai untuk aktivitas/kegiatan OJK dan bukan untuk dijual serta memiliki satu tahun atau lebih masa manfaat. Pengakuan fix asset ini terjadi apabila hak kepemilikan dan atau penguasaan aset berpindah ke OJK. Aset tetap OJK diukur berdasarkan biaya perolehan dengan metode penyusutan/amorisasi yang digunakan adalah garis lurus.

Persediaan. SEDKOtoritas Jasa Keuangan No. 32/SEDK.02/2017 mengenai amandemen ketiga atas SEDK OJK Nomor 22/SEDK.02/2014 tentang pedoman akuntansi otoritas jasa keuangan, persediaan merupakan aset lancar yang diperoleh antara lain dalam bentuk alat tulis kantor dan perlengkapan komputer yang disimpan dalam ruang penyimpanan satuan kerja yang melakukan pengadaan persediaan dan belum digunakan untuk kegiatan OJK. Persediaan diukur sebesar harga perolehan yang meliputi semua pembelian dan lain sebagainya yang muncul hingga barang terdapat di lokasi dengan kondisi siap untuk dipakai/digunakan.

3. METODE DAN TEKNIK PENERAPAN IPTEKS

3.1. Metode Penerapan Ipteks.

Metode ipteks yang diterapkan adalah mengimplementasikan internal control menurut Criteria Of Control (COCO) pada struktur pengendalian intern aset tetap dan persediaan pada Kantor Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sulawesi Utara, Gorontalo dan Maluku Utara sehingga dapat berjalan efektif dan efisien.

3.2. Teknik Penerapan Ipteks.

Teknik penerapan ipteks adalah dengan melakukan pengamatan serta turut membantu dalam proses pengendalian aset tetap dan persediaan dengan melakukan *stock opname* dan pengisian kartu persediaan KOJK Prov. SulutGo Malut. Berdasarkan pengalaman tersebut maka dilakukan pengimplementasian struktur pengendalian intern aset tetap dan persediaan menurut Criteria of Control (COCO) agar berjalan secara efektif dan efisien dengan 4 komponen yakni : (1) tujuan; (2) komitmen; (3) kemampuan; dan (4) pengawasan dan pembelajaran.

4. PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Objek Penerapan Ipteks

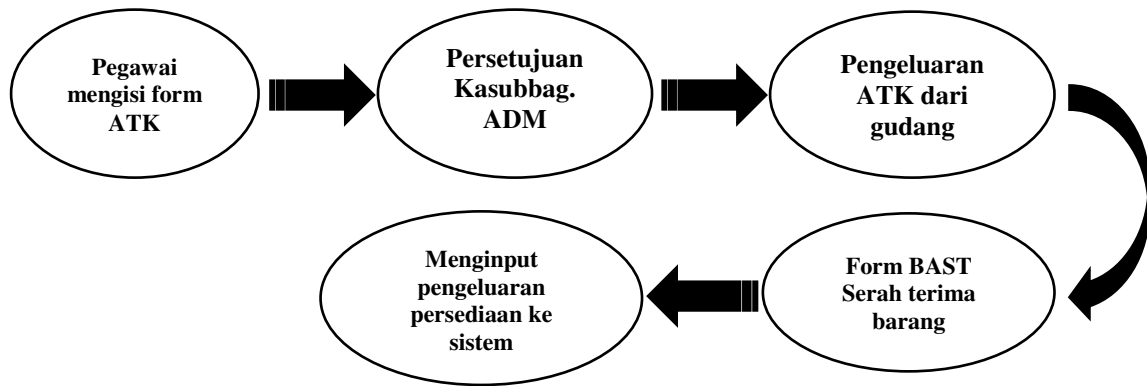
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah instansi yang berdiri sendiri tanpa campur tangan dari luar maupun lain pihak yang memiliki fungsi mengadakan pengawasan dan pengaturan yang terpadu dan atau terintegrasi terhadap aktivitas/kegiatan secara keseluruhan dalam industri jasa keuangan seperti Bank, Capital Market atau PM dan Industri Keuangan Non Bank seperti tertuang dalam UU No. 21 Tahun 2011. Mengacu pada Pasal 4 UU No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan berisi mengenai tujuan pembentukan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksudkan agar aktivitas dan atau kegiatan didalam industry jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel dan sanggup menghasilkan financial system yang tumbuh secara berkesinambungan dan stabil, serta sanggup melindungi kepentingan masyarakat atau konsumen.

Sebelum terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pengawasan industri keuangan berjalan terpisah dimana BI melakukan pengawasan pada industry bank dan Bapepam-LK pada capital market atau pasar modal dan industri keuangan non bank. Tugas ini kemudian dialihkan ke otoritas jasa keuangan yakni pengawasan industri keuangan non bank dan pasar modal secara resmi peralihan dari Kementrian Keuangan dan Bapepam-LK ke Otoritas Jasa Keuangan pada 31 Desember tahun 2012. Sedangkan pengawasan di indusrtly bank peralihan ke Otoritas Jasa Keuangan pada 31 Desember tahun 2013 dan industry keuangan mikro pada tahun 2015. Sejak 2011 sampai dengan sekarang Otoritas jasa Keuangan telah memiliki 9 (sembilan) Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan dan 46 Kantor Otoritas Jasa Keuangan diseluruh Indonesia, salah satunya adalah KOJK Prov. Sulawesi Utara, Maluku Utara dan Gorontalo. KOJK Prov Sulawesi Utara, Maluku Utara dan Gorontalo resmi berlokasi di Jl. Diponegoro No. 51, Manado tanggal 22 februari 2018 setelah sebelumnya berkantor di gedung Bank Indonesia lantai IV.

Pengendalian Intern Terhadap Aset Tetap dan Persediaan di Kantor OJK Provinsi Sulawesi Utara, Gorontalo dan Maluku Utara. Terdapat 3 bagian utama dalam struktur organisasi KOJK Provinsi Sulawesi Utara, Gorontalo dan Maluku Utara yakni bagian pengawasan bank, bagian pengawasan industri keuangan nonbank (IKNB), perlindungan konsumen (PM) dan edukasi perlindungan konsumen (EPK) serta bagian administrasi. Pengadaan aset tetap dan persediaan di KOJK Provinsi Sulawesi Utara, Gorontalo dan Maluku Utara diotoritasi oleh bagian administrasi selajutnya akan diteruskan ke departemen logistik untuk dicek apakah termasuk dalam positif list. Kemudian dilakukan penganggaran oleh bagian keuangan. Berdasarkan PDK Otoritas Jasa Keuangan No: 10/PDK.02/2014 mengenai amandemen Atas PDK Otoritas Jasa Keuangan No: 24/PDK.02/2013 tanggal 12 agustus 2014 mengenai Pedoman Pengadaan Barang Dan Jasa Otoritas Jasa Keuangan bergantung pada nominal pengadaan yakni :

- < Rp. 50.000.000 dilakukan pembelian/penunjukkan langsung
- <Rp. 250.000.000 dilakukan pengadaan langsung
- >Rp. 250.000.000 dilakukan lewat lelang kementrian keuangan.

Dalam hal pengeluaran barang dari gudang ATK berdasarkan permintaan, KOJK Prov. Sulawesi Utara, Maluku Utara dan Gorontalo memiliki alur bisnis sebagai berikut :



4.2. Pembahasan

Pengendalian intern aktiva maupun persediaan hendaknya memenuhi 5 unsur dibawah ini agar dapat berjalan dengan efektif dan efisien :

Tujuan. Setiap organisasi harus memiliki tujuan yang jelas yang nantinya akan mengarahkan organisasi pada aktivitas yang harus dilakukan dan pengendalian yang dibutuhkan. Tujuan ini harus dinyatakan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak. Organisasi juga wajib menetapkan prosedur yang dibuat untuk membantu tercapainya tujuan organisasi dan manajemen risik harus dirancang, dibicarakan atau diinformasikan dan diimplementasikan sehingga pekerja paham apa yang diperlukan untuk bertindak, sebagai contoh pelatihan sumber daya manusia yang berhubungan dengan aset tetap maupun persediaan terhadap departemen yang bertanggung jawab. Kantor Otoritas Jasa Keuangan juga harusnya memisahkan fungsi keuangan dan logistik.

Komitmen. Pihak pihak dalam organisasi harus memahami dan menyelaraskan dengan nilai nilai budaya organisasi seperti integritas, profesionalisme, sinergi, inklusif serta visioner. Menurut sopiah (2008:155) komitmen karyawan adalah dimensi keprobadian yang dapat dipakai guna menilai kecenderungan pekerja bertahan sebagai bagian dari organisasi. Rendahnya komitmen akan berdampak pada kinerja karyawan yang nantinya akan menghambat pencapaian tujuan organisasi. Tanggungjawab serta kewenangan harus secara terbuka dideskripsikan dan sesuai dengan tujuan organisasi. Seperti halnya penetapan kebijakan SOP dalam hal permintaan aset tetap maupun persediaan harus secara konsisten dipatuhi.

Kemampuan. Pekerja wajib mempunyai kecakapan, wawasan dan keterampilan yang bail untuk membantu tercapainya tujuan organisasi. Pegawai wajib melakukan pengolaan aset tetap dan persediaan secara tepat misalkan dari segi perawatan aset tetap, pegawai juga harus memahami perlakuan terhadap aset tetap dan persedian baik itu pengakuan maupun pengukuran. Seperti halnya penataan persediaan dalam gudang KOJK Provinsi Sulawesi Utara, Gorontalo dan Maluku Utara hendaknya menerapkan metode First In First Out (FIFO) sehingga kemungkinan barang tidak terpakai atau rusak bisa diminimalisir. Organisasi harus dapat mengkoordinasikan tujuan dan aktivitas dari setiap bagian/divisi yang berbeda melalui penetapan kebijakan Briefing Monday dimana setiap pihak akan saling mengkomunikasikan kondisi terkini setiap divisi bersangkutan.

Pengawasan dan pembelajaran. Organisasi harus melakukan pengawasan terhadap aset tetap maupun persediaan baik mulai dari perolehan aset, pencatatan aset maupun aset yang tersedia didalam gudang. Dalam hal stock opname yang dilakukan KOJK Provinsi Sulawesi Utara, Gorontalo dan Maluku Utara terdapat kartu persediaan yang digunakan sebagai pembanding, namun terdapat beberapa kekurangan seperti informasi harga persatuan yang tidak ditulis secara lengkap. Organisasi juga dituntut harus tepat dalam hal penyediaan jumlah aset tetap maupun persediaan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Kegiatan operasional KOJK Prov. Sulawesi Utara, Maluku Utara dan Gorontalo akan berjalan dengan efektif dan efisien jika pengendalian internal yang diterapkan telah sesuai dengan hal-hal diatas seperti penetapan tujuan, komitmen, kemampuan dan pengawasan dan pembelajaran.

5.2. Saran

Pengetahuan mengenai perlakuan aset tetap maupun persediaan perlu ditingkatkan sehingga memitigasi resiko yang bakal terjadi seperti perlu diterapkan metode FIFO dalam penataan persediaan di gudang sehingga menghindari kemungkinan barang tidak terpakai/rusak lebih kecil. Melengkapi informasi yang terdapat dalam kartu persediaan sehingga informasi yang disediakan andal dan dapat dipercaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Surat Edaran Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32 /SEDK.02/2017 Tentang Perubahan Ketiga Atas Surat Edaran Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/SEDK.02/2014 Tentang Pedoman Akuntansi Otoritas Jasa Keuangan
- Peraturan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 24/PDK.02/ 2013 Tentang Pedoman Pengadaan Barang Dan Jasa Otoritas Jasa Keuangan
- Peraturan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 10/PDK.02/2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 24/PDK.02/2013 Tentang Pedoman Pengadaan Barang Dan Jasa Otoritas Jasa Keuangan
- Keputusan Deputi Komisiner Manajemen Strategi II B Nomor: KEP-04/MS.4/2015 Tentang Daftar Aset Tetap Dan Aset Tak Berwujud Otoritas Jasa Keuangan
- Surat Edaran Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 8 /SEDK.02/2015 Tentang Akuntansi Aset Tetap Dan Aset Tak Berwujud
- Laporan Keuangan Tahun 2016 Otoritas Jasa Keuangan Audited
- Setiawati Sulyanto.2012 Perkembangan Pengukuran Pengendalian Internal
- Jesella Lourina Makaluas, Winston Pontoh Pengendalian Intern Aset Tetap Pada Pt. Lumbung Berkat Indonesia
- Zamzami Faiz, Faiz Arifin Ihda, Mukhlis,2013 *Audit Internal Konsep Dan Praktik*. Penerbit Gadjah Mada University Press
- Apendix 7a - Risk And Internal Control Frameworks – McGraw-Hil Education Canada
- Stefani Rosaria Priyambodo, Implementasi Control Objectives For Information And Related Technology Terhadap Audit Internal Di Indonesia